



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN
2024 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 terdapat terdapat nama keluarga penerima manfaat yang meninggal dunia;
- b. bahwa dengan telah menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengganti keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 (Berita Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 (Berita Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal III

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 31 Juli 2025
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 31 Juli 2025
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

BERITA DESA MALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 5.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA
DESA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA	KRITERIA PENERIMA	SUMBER DATA (DTKS/P3KE / HASIL MUSDES)
1	2	5	6	7		8
1	SAMIDI	Dk Malangan 001 001	Pedagang	1	Tidak menerima bantuan sosial	DTKS
2	NGATIYEM	Dk Malangan 001 001	Wiraswasta	3	Mempunyai anggota keluarga sakit menahun	DTKS
3	MUHAMAD LUTFI	Dk Malangan 002 001	Karyawan Swasta	1	Kehilangan mata pencaharian/miskin	Non DTKS / Hasil Musdes
4	AGUS MA'SUM	Dk Malangan 002 001	Wiraswasta	4	Kehilangan mata pencaharian	DTKS
5	JIYEM	Dk Malangan 001 002	Pedagang	2	Kepala keluarga miskin/Lansia	DTKS
6	JAMIYEM	Dk Malangan 001 002	Wiraswasta	1	KK tunggal Lansia	DTKS
7	YAMTI	Dk Malangan 002 002	Petani	1	KK tunggal Lansia	DTKS
8	TUKIYEM	Dk Malangan 002 002	Pedagang	1	KK tunggal Lansia	DTKS
9	SUPRIYADI	Dk Malangan 003 002	Karyawan Swasta	7	Mempunyai anggota keluarga sakit menahun	DTKS
10	YULI WURIASIH	Dk Malangan 003 002	Karyawan Swasta	2	Perempuan Kepala keluarga miskin	DTKS
11	YATIYEM YATMO	Dk Malangan 001 003	Wiraswasta	1	KK tunggal lansia	DTKS

12	WAHYUNI	Dk Malangan	001 003	Pedagang	3	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	DTKS
13	MARYONO	Dk Malangan	002 003	Wiraswasta	4	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	DTKS
14	PARTINI	Dk Malangan	002 003	Swasta	1	KK tunggal lansia	DTKS
15	SUKIDI	Dk Gatak	001 004	Pedagang	1	KK tunggal miskin	DTKS
16	ADI RISKIAWAN	Dk Gatak	001 004	Pedagang	1	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
17	SRIWI	Dk Gatak	002 004	Wiraswasta	4	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
18	SUYATI	Dk Pundungsari	001 005	Buruh harian lepas	2	KK perempuan lansia	DTKS
19	SRI MULYONO	Dk Pundungsari	001 005	Buruh harian lepas	4	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
20	BONO	Dk Pundungsari	002 005	Pedagang	2	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	DTKS
21	TUKIRIN	Dk Pundungsari	002 005	Penjahit	1	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	Non DTKS / Hasil Musdes
22	KARSINI	Dk. Ngoro-oro	001 006	Wiraswasta	1	KK perempuan tunggal miskin	DTKS
23	RUBIYEM	Dk. Ngoro-oro	001 006	Pedagang	1	KK perempuan tunggal miskin	Non DTKS / Hasil Musdes
24	WARNO WIYONO	Dk. Ngoro-oro	002 006	Pedagang	2	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
25	SUPARMIN	Dk. Ngoro-oro	002 006	Pedagang	2	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
26	SUPATMI	Dk Gunungsudo	003 006	Pedagang	2	KK perempuan miskin	DTKS
27	NGATEMI	Dk Gunungsudo	003 006	Pedagang	1	KK tunggal lansia	DTKS
28	GIYOTO	Dk Gunungsudo	001 007	Petani	2	Kepala keluarga miskin/Lansia	DTKS
29	PONIYEM	Dk Gunungsudo	001 007	Petani	5	Lansia	DTKS

30	SUHARNI	Dk Gunungsudo	002	007	Mengurus rumah tangga	1	KK perempuan tunggal miskin	Non DTKS / Hasil Musdes
31	SETIANINGSIH	Dk Gunungsudo	002	007	Karyawan swasta	3	Kehilangan mata pencaharian/miskin	Non DTKS / Hasil Musdes
32	PAIDI	Dk Gunungan	001	008	Pedagang	2	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
33	KOMING AL BUHORI	Dk Gunungan	001	008	Petani	1	KK tunggal lansia	DTKS
34	MUSIYEM	Dk Gunungan	002	008	Pedagang	2	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	DTKS
35	SARNI	Dk Gunungan	002	008	Petani	5	KK perempuan miskin	DTKS
36	TRI RAHAYU	Dk Gunungan	001	009	Karyawan Swatsa	3	Kehilangan mata pencaharian/miskin	DTKS
37	KASEMI	Dk Gunungan	001	009	Buruh	2	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	DTKS
38	PARYONO	Dk Gunungan	002	009	Buruh harian lepas	2	Mempunyai anggota keluarga sakit kronis	DTKS
39	SRI MULYATI	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	1	KK tunggal miskin	DTKS

Kepala Desa Malangan,

ttd

TUKIJO